

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Migrasi Internasional merupakan suatu aktivitas perpindahan penduduk yang berlangsung dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan melewati batas-batas negara. Selain itu migrasi internasional juga memperhatikan berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya (Haris 2017). Contoh aktivitas migrasi internasional ialah pengungsi Suriah yang ada di Turki. Tercatat bahwa pengungsi Suriah yang ada di Turki ada sekitar 3,7 juta pengungsi pada tahun 2020 (Fahzry 2020). Selain itu juga terdapat aktivitas migrasi dalam aspek ekonomi seperti pekerja migran yang ada di Indonesia tercatat pada tahun 2019 terdapat sekitar 276.553 orang yang bekerja formal maupun informal di berbagai negara (BNP2TKI 2020). Sehingga aktivitas migrasi dapat dijabarkan sebagai suatu aktivitas perpindahan penduduk yang dilakukan karena alasan mendesak meliputi aspek keamanan, politik, ekonomi, sosial dan budaya melewati batas-batas negara.

Membahas mengenai aktivitas migrasi sebenarnya telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu untuk mencari kehidupan yang layak. Setelah perang dunia terjadi aktivitas migrasi semakin meningkat karena untuk menghindari konflik perang. Kegagalan LBB dalam menangani konflik Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 menimbulkan dampak buruk terhadap para korban konflik. Setelah perang terjadi banyak menimbulkan korban perang dan menyebabkan pengungsi besar-besaran di berbagai negara. Seperti Pengungsi Vietnam pada tahun 1955 terdapat 46.348 warga Vietnam mengungsi ke Prancis dan 28.916 mengungsi ke Jerman untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Robinson 2015). Dari hal tersebut banyak orang yang kemudian melakukan aktivitas migrasi untuk memperoleh keamanan dengan melakukan migrasi ke negara yang dinilai mampu memberikan perlindungan.

Aktivitas migrasi internasional semakin bertambah pesat kemudian menimbulkan banyak dampak positif maupun negative. Salah satu dampak positif

adanya pengungsi adalah adanya pemasukan devisa negara dengan para pencari suaka yang kemudian menjadi pekerja di negara tersebut. Sedangkan dampak negatif yang diberikan dengan adanya pengungsi adalah sering ditemukannya berbagai permasalahan seperti administrasi, kericuhan, kekerasan, penyelundupan manusia, dan kejahatan manusia lainnya. Permasalahan pengungsi yang tidak mendapatkan hak-haknya seperti Pengungsi Palestina, Pengungsi Yahudi, Pengungsi Suriah dan lain-lain. Terdapat 340 ribu pengungsi Yahudi yang melarikan diri ke eropa karena mendapat banyak penyiksaan dan 11 juta orang menjadi korban kekejaman Nazi akibat perang dunia 2 yang menyebabkan *exodus* besar-besaran pengungsi di seluruh dunia termasuk Asia dan Afrika (Sari 2015). Dari hal tersebut timbulah kesadaran masyarakat untuk kemudian memperhatikan hukum yang mengatur tentang pengungsi. PBB bersama UNHCR kemudian merilis suatu Konvensi Jenewa tahun 1951 yang mengatur tentang pengungsi dan Protokol tahun 1967.

Australia merupakan salah satu destinasi favorit para pencari suaka. Australia termasuk salah satu negara sepuluh besar yang menduduki sebagai negara yang menjadi tujuan utama para pengungsi bersamaan dengan Amerika, Asia dan Eropa. Menurut *Australian Bureau of Statistics* tercatat ada sekitar 7.5 juta orang pengungsi yang tinggal di Australia sampai tahun 2019 (ABS 2020). Australia menjadi salah satu negara favorit karena memiliki *Pull Factor* yakni Australia memiliki kemajuan negara dan jaminan hidup yang tinggi sehingga banyak para imigran yang kemudian ingin datang ke Australia. Australia adalah negara *commonwealth* yang merupakan bagian dari negara pesemakmuran inggris yang mana negara terdiri dari beberapa bagian federal sehingga tercipta multietnistik dan membuat ketertarikan para pengungsi untuk datang ke Australia.

Sejak tahun 1970an Australia telah menghadapi isu imigran ilegal melalui jalur laut atau biasa disebut sebagai "*boat people*" (Matthew 2016). Manusia perahu atau biasa disebut *boat people* merupakan pengungsi yang menggunakan perahu dengan status ilegal. Kemunculan manusia perahu ini kemudian pada tahun 2013 melalui *Departement Immigration and Citizenship (DIAC)* menyebut para pencari suaka yang datang menggunakan perahu sebagai *Irregular Maritime*

Arrivals (IMA). Australia menyatakan bahwa para manusia yang datang menggunakan perahu tidak bisa mengajukan permohonan visa sebagai turis maupun untuk bisnis. Apabila mereka ditetapkan sebagai pengungsi maka pemerintah Australia tetap menolak kedatangan mereka. Hal ini karena kedatangan *boat people* ini tidak dianggap sebagai pengungsi ataupun pencari suaka melainkan sebagai praktek tindak kejahatan manusia.

Pada tahun 2001-2008 Howard menerapkan kebijakan *pacific Solution* melalui pengimplementasian *Offshore Detention*. Dalam kebijakan tersebut para pencari suaka yang hendak memasuki Australia diwajibkan untuk menjalani *Detention Camp*. Para pengungsi yang berstatus illegal akan ditempatkan ke pusat detensi yang ada di Pulau Naurus dan Pulau Manus, Papua Nugini dan Pulau Christmas. Adanya kebijakan mengenai *Detention Camp* ini yang kemudian menjadi bagian dari kebijakan untuk menempatkan para pengungsi illegal dari jalur laut ke beberapa pusat detensi untuk kemudian diproses. Howard mengambil kebijakan *pacific solution* untuk memperketat keamanan negara dan mengembalikan para pengungsi ke negara asalnya. Tercatat pada tahun 2002-2007 hanya ada 18 perahu dengan 288 IMAs (R. F. Prabaningtyas 2015). Dari adanya kebijakan tersebut terbukti dapat membantu menekan laju peningkatan migrasi yang ada di Australia. Masyarakat Australia juga menganggap kebijakan tersebut efektif untuk mengurangi IMAs yang datang ke Australia. Meskipun setelahnya kebijakan *Pacific Solution* ini ditentang oleh pemerintah selanjutnya yakni Kevin Rudd dengan melonggarkan kembali kebijakan tersebut, namun banyak masyarakat Australia yang menilai kebijakan yang digunakan oleh Howard lebih efektif untuk mengatasi pertumbuhan pengungsi yang datang ke Australia.

Pada tahun 2013-2014 pemerintahan Tony Abbot beserta Scott Morrison sebagai Menteri Imigrasi yang merealisasikan kebijakan ketat kembali terhadap pengungsi jalur laut ini. Scott Morrison mengampanyekan “*Stop For Boat*” melalui kebijakan penerapan program *OSB (Operation Sovereign Border’s Policy)* (ardianti 2015) .OSB merupakan kebijakan operasi penjagaan keamanan perbatasan yang dipimpin oleh militer. Dalam kebijakan ini kapal yang datang akan dikembalikan keperairan negara terdekat. Para *boat people* yang ditolak oleh pemerintah Australia

kemudian akan ditempatkan ke pusat-pusat detensi yang ada di Pulau Christmas dan wilayah negara tetangga yakni Pulau Nauru Dan Manus, Papua Nugini sampai dapat memperoleh status ilegalnya. Kebijakan OSB tersebut Australia sampai menghabiskan dana sekitar AUD 10, 4 Milyar yang digunakan untuk menangani kasus pengungsi pada tahun 2013-2014 (Soeslawati 2014)

Permasalahan IMAs atau imigran semakin meningkat tidak hanya sekedar permasalahan administrasi namun juga melibatkan permasalahan tindakan kriminal. Tindakan kriminal tersebut meliputi penyelundupan manusia, aksi penyerangan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain. Berikut data yang menunjukkan beberapa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh para imigran.

Tabel 1.1 Data Tindakan Kriminal Imigrant

Tindakan kriminal	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Penyerangan serius	1699	1576	1462
Pencurian berat	182	504	540
Pelanggaran seksual	317	379	361
Perampokan kendaraan	2201	2211	2078

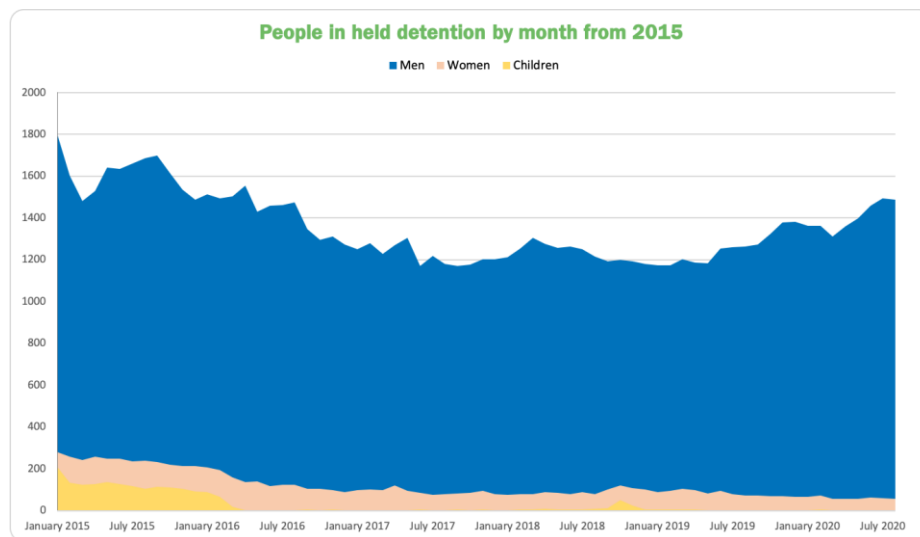
Sumber: Badan Statistik Kejahatan Victoria, Ausie

Kemudian Pada tahun 2018 Scott Morrison terpilih menjadi perdana menteri. Scott Morrison terkenal keras dengan kebijakan OSB (Operation Sovereign Border) yang kontroversial dan menuai kritik mengenai pengungsi jalur laut. Sebelum terpilih menjadi perdana menteri Scott mengampenyakan untuk semakin memperketat kebijakan terhadap pengungsi dengan mengurangi jumlah pengungsi sekitar 18.750 orang saja yangizinkan untuk memasuki Australia. Jumlah tersebut lebih rendah 30% dari yang ditawarkan oleh lawanya partai buruh (Chritiastuti 2018).

Scott Morrison juga menerapkan kebijakan ketat untuk kembali membuka pusat detensi bagi para pengungsi. Pusat detensi merupakan salah satu tempat penampungan para pengungsi yang berstatus ilegal terutama yang berasal dari jalur laut. Pusat detensi tersebut sering dikecam oleh dunia internasional karena banyak

terjadi banyak pelanggaran HAM (John Minns 2018). Pusat Detensi yang ada di Pulau Nauru, Pulau Manus dan Pulau Christmas merupakan bagian dari kebijakan Australia guna menampung para pengungsi ilegal yang datang dari jalur laut. Kebijakan ini telah diterapkan untuk mencegah para pengungsi ilegal datang dan menetap di Australia. Berikut tabel sejak 2015-2020 mengenai jumlah para pengungsi jalur laut yang ditahan di berbagai pusat detensi yang ada di Australia.

Gambar 1.1 Diagram para pencari suaka di pusat penahanan sejak 2015-2020



Sumber: Pencethttps://www.refugeecouncil.org.au/detention-australia-statistics/3/us

Setelah sebelumnya Australia telah menutup empat pusat detensi yang ada di beberapa negara bagian dikarenakan untuk menghemat anggaran pengungsi. Pemerintah Tony Abot beserta Scott Morrison telah melakukan upaya pengetatan kebijakan pengungsi jalur laut melalui program OSB (*Operation Sovereign Border*). Scott Morrison yang menjabat sebagai perdana menteri baru menerapkan kebijakan yang sama terkait pengetatan jalur laut dengan implementasi OSB. Kemudian pada tahun 2019 Scott Morrison menerapkan kebijakan baru tentang pembukaan kembali pusat detensi yang ada di pulau Christmas. Salah satu kebijakan Scott Morrison mengenai pembukaan kembali pusat detensi tersebut

menimbulkan keresahan kembali bagi para pengungsi jalur laut yang sebelumnya telah ditutup pada oktober 2018. Scott Morrison menerapkan kebijakan tersebut setelah menuai kekalahan voting terhadap pembahasan UU keimigrasian. Scott Morrison menganggap bahwa kebijakan untuk membuka kembali pusat detensi yang ada di pulau Christmas merupakan hasil dari rekomendasi aparat pemerintah untuk meminimalisir para pengungsi ilegal jalur laut yang ingin memasuki Australia. Kebijakan pembukaan pusat detensi menandakan bahwa Scott Morrison melakukan upaya yang serius dalam melakukan pembatasan imigran (Indonesia 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

“Mengapa Australia Melakukan Sekuritisasi Migrasi Dengan Membuka Kembali Pusat Detensi di Pulau Christmas Pada Era Scott Morrison Tahun 2018-2019?”

C. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan unit analisis berupa teori sekuritisasi.

Teori Sekuritisasi

Sekuritisasi merupakan salah satu teori yang mahsyur di kalangan studi hubungan internasional. Teori ini dikembangkan oleh para penganut *Copenhagen School* yang terdiri dari beberapa tokoh seperti Barry Buzan, Jaap de Wilde dan Old Weaver yang memiliki kontribusi dalam pencetusan dan pengembangan terkait teori sekuritisasi. Mahzab *Copenhagen School* memberikan pandangan dimensi baru terkait konsep keamanan yang dipandang memiliki jangkauan yang lebih luas (Buzan 1987). Dalam hal ini isu keamanan tradisional yang pada dasarnya hanya berfokus terhadap keamanan negara dari aspek militer, kini telah mengalami perluasan menuju isu keamanan non-tradisional (non-militer). Sehingga sekuritisasi merupakan sebuah proses untuk melakukan politisasi terhadap isu atau fenomena

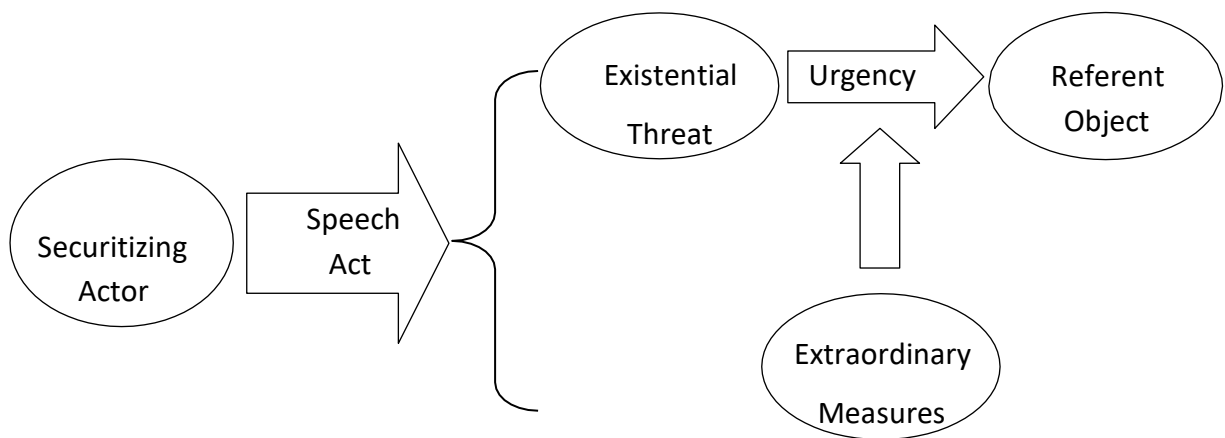
yang terjadi sebagai permasalahan serius. Dimana isu-isu tersebut biasanya merupakan isu keamanan non tradisional (Hadiwinata 2017).

Menurut pandangan *Copenhagen* terdapat pergesaran arah *referent object* (benda atau objek yang diamankan). Jika sebelumnya *referent object* dari keamanan tradisional merupakan negara, maka adanya *referent object* dari keamanan tradisional ialah merujuk pada negara dan masyarakat yang dianggap terancam sehingga perlu untuk diamankan (Sudagung 2017).

Dalam teori ini Buzan terdapat 4 komponen utama dari sekuritisasi yakni *speech act*, *securitizing actors*, *audience* dan *facilitating conditions*. Menurut Buzan *speech act* dilakukan oleh *securitizing actor* yakni oleh pemimpin politik, birokrat atau pemerintah dan tokoh pemerintah. Sehingga menurut Carl Schmitt *securitizing actor* merupakan mereka yang berdaulat untuk memutuskan kebijakan yang diambil apabila sebuah eksepsi terjadi atau merujuk pada institusi atau pemegang otoritas. Sedangkan makna dari *audience* tidak dipaparkan secara jelas namun dapat dipahami sebagai mereka yang perlu untuk dipersuasi oleh *securitizing actor* supaya mendapatkan persetujuan atas tindakan sekuritisasi tersebut. Sedangkan *facilitating condition* merujuk pada kondisi-kondisi dimana suatu proses sekuritisasi dapat bekerja. Meliputi komponen plot keamanan, modal sosial pemberi sinyal, kondisi keamanan, kondisi audiens dan lain-lain. Dalam hal ini *facilitating condition* sering disebut sebagai *functional Actor* yang merupakan bagian dari komponen pembantu dalam proses sekuritisasi seperti media dan aktor lainnya. (Hansen n.d.).

Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan proses sekuritisasi, kita bisa melihat bagan proses sekuritisasi yang diilustrasikan oleh Özcan (2013) di bawah ini:

Securitization Process



Gambar 1.2 Teori Sekuritisasi (Sumber: Sezer Özcan, “*Securitization of Energy Throught The Lenses of Copenhagen School*”, *The 2013 WEI International Academic Conference Proceedings*, 2013, hal 9)

Dalam sekuritisasi migrasi terdapat beberapa alasan kenapa migrasi menjadi bagian dari isu yang penting dalam suatu negara. Dalam prakteknya isu migrasi yang menanggapi permasalahan para imigran telah bergeser jika sebelumnya isu migrasi dianggap sebagai isu yang non-tradisional atau isu biasa kini telah bergeser arahnya kedalam isu yang dianggap penting. Hal ini karena isu migrasi yang melibatkan para imigran untuk melakukan migrasi secara besar-besaran merupakan suatu hak yang dijamin oleh konstitusi. Akibat dari aktivitas migrasi yang terus meningkat mengakibatkan berbagai acaman dan tindak pelanggaran HAM. Hal ini meliputi aspek kekhawatiran dari adanya ancaman bahaya dari adanya arus migrasi. Kekhawatiran tersebut diperoleh karena adanya anggapan bahwa para migran dan pengungsi membahayakan keamanan penduduk. Para pengungsi dan migran sering dianggap sebagai sumber konflik internasional, ancaman politik negara penerima, ancaman budaya nasionalisme, dan dapat mengakibatkan terpecahnya suatu konflik baru (Maujana 2020).

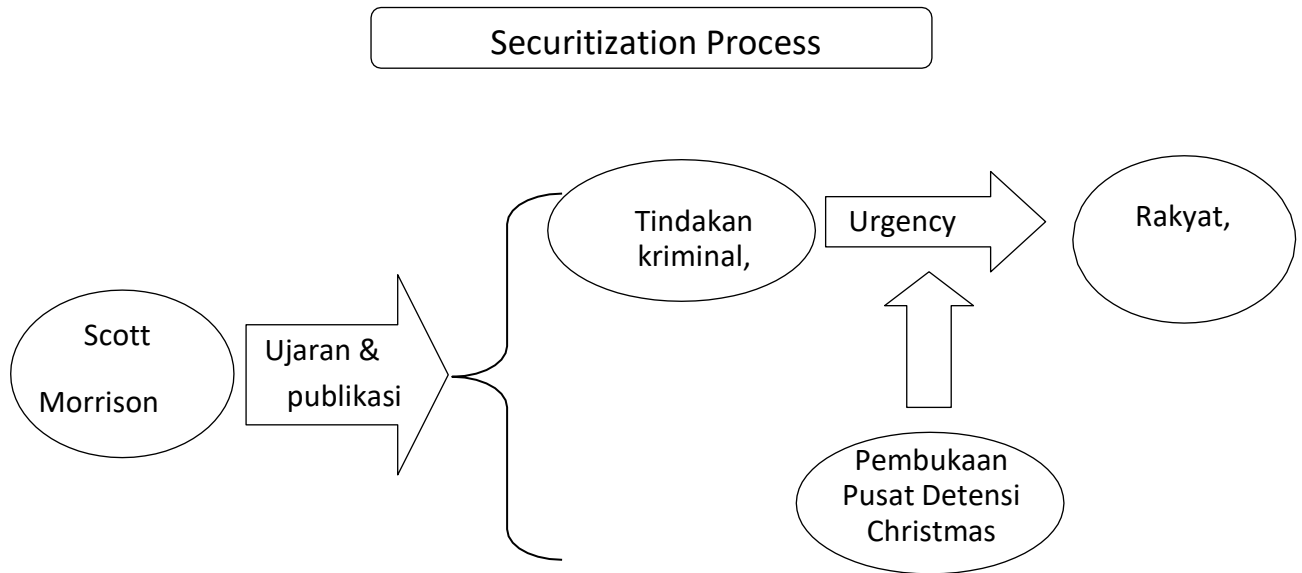
Adanya ancaman tersebut digunakan sebagai alat speech act untuk menakutkan masyarakat bahwa isu migrasi merupakan isu yang penting dalam suatu negara. Imigran sebagai sumber konflik internasional diwujudkan dalam

anggapan bahwa para imigran sebagai ancaman bagi penyelundupan manusia, terorisme, perdagangan manusia dan lain-lain adalah sebagai sebuah ancaman yang serius (*Existential Threat*). Ancaman tersebut dilakukan oleh aktor yang disebut sebagai *Securitizing Actor* yang memiliki kekuasaan seperti kepala pemerintah untuk melakukan proses sekuritisasi. Setelah *speech act* dilakukan maka akan direspon oleh *referent object* yaitu masyarakat atau public. Dalam hal ini Scott Morrison yang berperan sebagai kepala pemerintah adalah aktor dari sekuritisasi migrasi. Scott kemudian melakukan upaya *speech act* mengenai ancaman migran yang akan memasuki Australia. Hal ini karena isu perbatasan Australia akan terganggu jika para imigran masuk ke Australia, meskipun terdapat kebijakan yang mengatur mengenai perizinan imigran masuk ke Australia namun Scott khawatir akan adanya peningkatan kasus imigran termasuk dalam hal penyelundupan manusia. Sehingga kemudian Scott Morrison menjadikan isu keamanan perbatasan sebagai isu yang krusial dan dilanjutkan dengan upaya pemberlakuan kembali pusat detensi di pulau Christmas yang digunakan untuk merespon kasus perbatasan.

Dalam proses sekuritisasi migrasi *speech act* merupakan bagian dari penyampaian sebuah isu atas fenomena yang diangkat sebagai isu keamanan. Sebuah isu dapat disebut sebagai sebuah ancaman apabila sekuritisasi (*securitizing actor*) telah menyatakan upaya *speech act* melalui pidato, demonstrasi atau siaran pers. Dalam prosesnya, *securitizing actor* akan melakukan *speech act* dengan menyatakan bahwa isu yang terkadang dianggap tidak berbahaya oleh masyarakat atau pemerintah sebagai sebuah ancaman (*existential threats*) bagi benda atau objek yang diamankan. Kemudian target *audience* yakni publik menjadi sasaran *speech act* yang telah diangkat sebagai ancaman. Oleh karena itu timbulah kesadaran untuk melakukan tindakan sekuritisasi sehingga *securitizing actor* pada akhirnya akan melakukan sebuah tindakan luar biasa dan cepat (*extra-ordinary measuring*) berupa kebijakan yang nantinya bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi *referent object* dari adanya *existential threat* (Pratiwi, 2018).

Berikut pengimplementasian proses sekuritisasi untuk memahami lebih lanjut terkait dengan proses sekuritisasi, kita bisa melihat bagan proses sekuritisasi

yang diilustrasikan oleh Özcan (2013) di bawah ini:



Gambar 1.3 Implementasi Teori

Kebijakan mengenai pembukaan pusat detensi imigran yang ada di Christmas Island merupakan salah satu kebijakan kontroversial. Scott Morrison yang terpilih pada 2018 lalu menanggapi isu imigran dari jalur laut ini sebagai *speech act* yang membahayakan Australia. Hal ini karena banyak yang tidak menyetujui adanya pembukaan pusat detensi tersebut karena banyak pengungsi yang merasakan penyiksaan selama berada di detensi tersebut. Scott Morrison membuka pusat detensi tersebut setelah parlemen mengabaikan peringatan pemerintah dan mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan pengungsi dan pencari suaka di Pulau Nauru dan Pulau Manus Papua Nugini masuk ke Australia untuk melakukan perawatan medis (Indonesia 2019). Hal itulah yang kemudian menjadi pertimbangan (*existensial threat*) untuk mengamankan Australia dari para pencari suaka ilegal. Namun sampai saat ini kebijakan tersebut masih menuai kontroversial dikarenakan kebijakan pembukaan pusat detensi tersebut diliputi unsur politik selain untuk mengizinkan pencari suaka sekitar 1000 orang yang membutuhkan perawatan medis (kemenkumham 2019).

Setelah adanya upaya *speech act* ini dilihat dari adanya kekalahan PM Scott Morrison dalam voting dengan partai oposisi dan DPR yang menunjukkan perbandingan 75 melawan 74 suara pada tanggal 13 Februari 2019. Adanya desakan-desakan dari partai oposisi dan DPR fraksi lain terhadap UU tentang keimigrasian yang kemudian mendukung adanya *Facilitating conditions* untuk melakukan pertimbangan mengenai kebijakan tersebut. Scott Morrison sebagai *securitizing actor* kemudian mengumumkan kebijakan pembukaan pusat detensi di pulau Christmas (detiknews 2019). Kebijakan Pembukaan pusat detensi tersebut sebagai *extra-ordinary measuring* yang dilakukan oleh Scott Morrison. Dari hal tersebut upaya sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Australia dilakukan untuk terwujudnya keamanan negara dari pengungsi ilegal jalur laut. Kebijakan Australia terhadap pembatasan pengungsi jalur laut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi para pengungsi disamping mementingkan keamanan negaranya. Australia sebagai negara yang mengedepankan demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan sepatutnya menyadari bahwa pentingnya hal tersebut. Pengaruh dari aktor pembuat kebijakan berdampak pada keberlangsungan negara tersebut. Oleh karena itu penting bagi pemerintahan untuk memperhatikan keamanan negaranya secara bijaksana.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dilakukan penelaahaan yang menghasilkan hipotesa atau dugaan sementara sebagai berikut:

Australia di bawah pemerintahan Scott Morrison menerapkan pengetatan kebijakan pengungsi jalur laut dengan membuka kembali pusat detensi di Pulau Christmas pada 13 Februari 2019 karena alasan sekuritisasi yang dinyatakan ke dalam argument sebagai berikut:

1. Australia melakukan upaya sekuritisasi migrasi karena untuk mengamankan negaranya dari perilaku tindakan kriminal oleh para imigran.
2. Pemerintah Scott Morrison melakukan sekuritisasi migrasi dengan membuka kembali pusat penahanan di pulau Christmas. Scott Morrison sebagai *Securitizing Actor* menjadikan Ancaman IMAs sebagai *speech act* terhadap

keamanan negara sehingga rakyat Australia merespon upaya tersebut sebagai alasan adanya sekuritisasi migrasi.

E. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul “Kebijakan Australia Dalam Memperketat Pengungsi Jalur Laut Dengan Membuka Kembali Pusat Detensi Di Pulau Christmas Pada Era Scott Morrison Tahun 2018-2019” ini, peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan Scott Morrison melakukan pembatasan terhadap kebijakan migrasi dengan membuka kembali pusat detensi di Pulau Christmas pada tahun 2018-2019.
2. Mengetahui kepentingan yang ingin dicapai oleh Scott Morrison dalam memperketat kebijakan migrasi terhadap pengungsi jalur laut di Australia.
3. Mengimplementasikan teori sekuritisasi dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan terhadap pembatasan imigran tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang menghasilkan analisis eksplanatif. Dimana dengan menggunakan analisis eksplanatif seluruh data mengenai migrasi internasional Australia yang diperoleh akan dilakukan penelaahan dan analisis secara mendalam mengenai kebijakan sekuritisasi yang kemudian diinterpretasikan kedalam pertanyaan penelitian mengenai alasan Australia membuka kembali pusat detensi di pulau Christmas dan digunakan sebagai penarikan kesimpulan yakni Australia melakukan pengetatan kebijakan pengungsi jalur laut dengan melakukan pembukaan kembali pusat detensi karena alasan sekuritisasi oleh Scott Morrison.

Penelitian ini memfokuskan pada pengamatan fenomena-fenomena terkait kebijakan pemerintah Australia dalam menangani migrasi terkait pengungsi dari jalur laut. Selain itu peneliti juga berusaha mengumpulkan berbagai data terkait arus migrasi Australia dari sumber-sumber utama yakni dengan membaca dan menelaah

buku, jurnal, artikel, tesis untuk membantu memperoleh data-data terkait imigrasi ilegal yang ada di Australia. Penulis memantau terkait berita nasional maupun berita internasional mengenai respond dan informasi aktual terkait kebijakan Scott Morrison terkait pembatasan imigrasi dan pusat detensi Australia. Selain itu penulis juga mencari sumber-sumber melalui website resmi seperti Australian Bureau of Statistic (ABS) terkait permasalahan kebijakan imigrasi di Australia secara komprehensif

G. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini berfokus pada jangkauan tentang kebijakan migrasi yang dilakukan oleh masa kepemimpinan Scott Morrison pada tahun 2018-2019. Selain itu penelitian ini juga membahas terkait fenomena-fenomena kebijakan migrasi laut sebelum masa kepemimpinan Scott Morrison yakni Tony Abot pada tahun 2013. Dari hal tersebut menimbulkan kebijakan untuk membatasi adanya kebijakan pengungsi jalur laut dengan membuka kembali pusat detensi yang ada. Sehingga adanya jangkauan waktu yang diberikan akan memberikan pengaruh terhadap kolerasi yang khas antara gaya kepemimpinan Australia dalam menangani kasus pengungsi jalur laut tersebut terutama pembatasan yang dilakukan di masa Scott Morrison.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menuliskan penelitian tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian yakni meliputi:

BAB I

BAB I memuat pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, kerangka masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Dalam BAB II menjelaskan fenomena-fenomena awal mengenai sejarah migrasi di Australia, keikutsertaan Australia dalam konvensi internasional, selain

itu juga akan memaparkan mengenai berbagai kebijakan-kebijakan dari migrasi Australia terlebih dalam penanganan pengungsi dari jalur laut.

BAB III

Dalam BAB III ini memuat pemaparan mengenai arus migrasi melalui jalur laut atau biasa disebut *boat people* yang menimbulkan kontroversial mulai dari kedatangan para pengungsi yang kemudian sampai di Australia secara illegal memaparkan mengenai aktivitas migrasi yang ada dalam pusat detensi pengungsi tersebut. Pada bagian ini merupakan penjelasan inti mengenai pengimplementasian teori sekritisasi tersebut dalam penerapan kebijakan pembatasan pengungsi jalur laut tersebut. Urgensi dari adanya pengaruh Scott Morrison juga menentukan kebijakan terkait pembukaan kembali pusat detensi yang dikencam oleh internasional.

BAB IV

BAB IV ini merupakan bagian dari penutup. Pada bagian ini memaparkan mengenai bagian kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti.